

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PARKIR DI KOTA PALEMBANG



Skripsi Oleh :

RIANA AYU SEPTIANI
01121002043

Ekonomi Pembangunan

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih
Gelar Sarjana Ekonomi*

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
(2016)

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

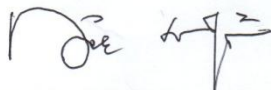
**ANALISIS POTENSI PENERIMAAN PAJAK PARKIR DI KOTA
PALEMBANG**

Disusun Oleh :

Nama : RIANA AYU SEPTIANI
NIM : 01121002043
Fakultas : EKONOMI
Jurusan : EKONOMI PEMBANGUNAN
Bidang Kajian/Konsentrasi : EKONOMI KEUANGAN DAERAH

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif


Dosen Pembimbing
Ketua
Tanggal Persetujuan


Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si
NIP. 196007101987031003

Tanggal : 27 Februari 2016

Anggota

Tanggal : 02 Maret 2016


Dr. Siti Rohima, M.Si
NIP.1969031420014092001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PARKIR
DI KOTA PALEMBANG**

Disusun oleh:

Nama : RIANA AYU SEPTIANI
NIM : 01121002043
Fakultas : EKONOMI
Jurusan : EKONOMI PEMBANGUNAN
Bidang Kajian/Konsentrasi : KEUANGAN DAERAH

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 12 Maret 2016 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif

Inderalaya, Maret 2016

Ketua

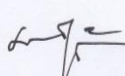
Anggota

Anggota



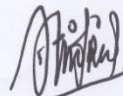
Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si

NIP. 196007101987031003



Dr. Siti Rohima, M.Si

NIP.1969031420014092001

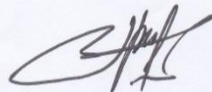


M. Subardin, S.E., M.Si

NIP.197110302006041001

Mengetahui,

Ketua Jurusan



Dr. Suhel, M.Si

NIP. 196610141992031003

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Riana Ayu Septiani
Nim : 01121002043
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian : Keuangan Daerah
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :
ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PARKIR DI KOTA PALEMBANG

Pembimbing :

Ketua : Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si
Anggota : Dr. Siti Rohima, M.Si
Tanggal Ujian : 12 Maret 2016

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Inderalaya, 16 Maret 2016



Riana Ayu Septiani

NIM: 01121002043

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Riana Ayu Septiani
Nim : 01121002043
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian : Keuangan Daerah
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :
ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PARKIR DI KOTA PALEMBANG

Pembimbing :

Ketua : Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si

Anggota : Dr. Siti Rohima, M.Si

Tanggal Ujian : 12 Maret 2016

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Inderalaya, 16 Maret 2016



Riana Ayu Septiani

NIM: 01121002043

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian Skripsi ini yang berjudul Analisis Penerimaan Pajak Parkir di Kota Palembang. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan, dan do'a, serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Dosen pembimbing Bapak Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si dan Ibu Dr. Siti Rohima, M.Si serta dosen penguji Bapak M. Subardin, S.E., M.Si yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing dan memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ayah dan Ibu yang telah memberikan dukungan dan doa kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Terima kasih untuk saudara-saudaraku dan teman-teman yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Inderalaya, 12 Maret 2016

Riana Ayu Septiani

ABSTRAK

Analisis Penerimaan Pajak Parkir di Kota Palembang

Oleh :
Riana Ayu Septiani

Penelitian ini menganalisis mengenai penerimaan pajak parkir di Kota Palembang. Tujuannya untuk melihat besarnya potensi penerimaan pajak parkir, tingkat efektivitas pajak parkir dan melihat bagaimana pengaruh PDRB perkapita dan jumlah kendaraan terhadap penerimaan pajak parkir di Kota Palembang.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder berupa data time series periode tahun 2005-2014. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel PDRB perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pajak parkir sedangkan variabel jumlah kendaraan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel pajak parkir. Berdasarkan hasil analisis potensi penerimaan pajak parkir di Kota Palembang mempunyai potensi yang cukup besar dan analisis efektivitas menyatakan pajak parkir dapat dikatakan rata-rata sangat efektif.

Kata Kunci : *Pajak Parkir, PDRB perkapita, Jumlah Kendaraan, Potensi Pajak, Efektivitas Pajak*

ABSTRACT

An Analysis of Parking Tax Revenue in Palembang City

by

Riana Ayu Septiani; Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si; Dr. Siti Rohima, M.Si

This study analyzed the parking tax revenue in Palembang City. The objective was to determine the amount of parking tax revenue potential, the effectiveness of parking taxes, and the influence of GRDP percapita and the number of vehicles on the parking tax revenue in Palembang City. The data used in this study were the primary data and secondary data. The secondary data were time series data in the period of 2005-2014. The regression results indicated that the variable GRDP per capita had a significant positive effect on the variable parking taxes, while the variable number of vehicles had a significant negative effect on the variable parking taxes. Based on the analysis of parking tax revenue potential, Palembang City had substantial potential, and the effectiveness analysis showed that the parking taxes could be said to be very effective on average.

Keywords: *parking taxes, GRDP percapita, number of vehicles, tax potential, tax effectiveness*

RIWAYAT HIDUP



Nama Mahasiswa	: Riana Ayu Septiani
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang, 16 September 1994
Agama	: Islam
Status	: Belum Menikah
Alamat Rumah (Orang Tua)	: Jl. Pangeran Ayin Komplek Griya Permata Sukma D4 Kenten Sako Palembang
Alamat Email	: rianaayu488@gmail.com

Pendidikan Formal

2000 – 2006	SD M.I. Adabiyah II Palembang
2006 – 2009	SMP Bina Warga Palembang
2009 – 2012	SMA Negeri 14 Palembang
2012 – 2016	Universitas Sriwijaya

Pendidikan Non Formal

Kursus Bahasa Inggris Gloria
Kursus Bahasa Inggris EAP II Lembaga Bahasa UNSRI

Pengalaman Organisasi

Anggota Divisi Keilmuan HIMEPA periode 2012-2013
Anggota Divisi Keilmuan HIMEPA periode 2013-2014
Anggota Kewirausahaan GenBI SumSel periode 2014-2015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Perumusan Masalah	8
I.3 Tujuan Penelitian	8
I.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN	
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Teori Peacock dan Wiseman	9
2.1.2 Teori Pigou	11
2.1.3 Pajak Daerah	13
2.1.4 Otonomi Daerah	17
2.1.5 Produk Domestik Regional Bruto	18
2.1.6 Pendapatan Perkapita	19
2.1.7 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	19
2.1.8 Pajak Parkir	20
2.2 Penelitian Terdahulu	22
2.3 Kerangka Pemikiran	26
2.4 Hipotesis Penelitian	27

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian	28
3.2 Jenis dan Sumber Data	28
3.3 Teknik Pengumpulan Data	29
3.4 Teknik Analisis Data	30
3.5 Uji Asumsi Klasik	31
3.5.1 Uji Normalitas	31
3.5.2 Uji Multikolinearitas	31
3.5.3 Uji Heteroskedastisitas	32
3.5.4 Uji Autokorelasi	32
3.6 Uji Statistik.....	33
3.6.1 Uji t.....	33
3.6.2 Uji F.....	34
3.7 Analisis Potensi Penerimaan Pajak Parkir	35
3.7.1 Analisis Potensi Pajak Parkir di Kota Palembang.....	35
3.7.2 Analisis Potensi Pajak Parkir Mall di Kota Palembang	35
3.8 Analisis Efektivitas Pajak Parkir.....	36
3.9 Definisi Operasional	37

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	39
4.1.1 Gambaran Umum Kota Palembang.....	39
4.1.2 Kependudukan.....	40
4.1.3 Perkembangan Pajak Parkir di Kota Palembang.....	43
4.1.4 Perekonomian Kota Palembang	46
4.1.5 Perkembangan Jumlah Kendaraan di Kota Palembang.....	49
4.2 Analisis Hasil Uji Regresi Berganda Linier OLS	51
4.2.1 Hasil Estimasi Persamaan Pajak Parkir.....	51
4.3 Uji Asumsi Klasik	52
4.3.1 Uji Normalitas	52
4.3.2 Uji Heterokedastisitas	53

4.3.3 Uji Autokorelasi	54
4.3.4 Uji Multikolinearitas	55
4.4 Uji Statistik.....	56
4.2.2 Uji T(<i>Parsial Test</i>) pada Pajak Parkir	56
4.2.3 Uji F pada Pajak Parkir	56
4.2.4 Koefesien Determinasi Pajak Parkir	57
4.5 Pembahasan	57
4.6 Analisis Potensi Penerimaan Pajak Parkir	61
4.5.1 Analisis Potensi Pajak Parkir di Kota Palembang.....	61
4.5.2 Analisis Potensi Pajak Parkir Mall di Kota Palembang	63
4.7 Analisis Efektivitas Pajak Parkir	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	70
5.2 Saran.....	71
Daftar Pustaka	72
Lampiran-Lampiran	75

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. : Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Palembang Tahun 2005-2014 (dalam rupiah).....	4
Tabel 1.2. : Penerimaan Pajak Parkir dan Hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang dari Tahun 2010-2014 (dalam rupiah)	5
Tabel 4.2. : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Palembang.....	41
Tabel 4.3. : Luas Daerah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Palembang.....	42
Tabel 4.4 : Daftar Jumlah wajib Pajak Parkir perkecamatan di Kota Palembang.....	44
Tabel 4.5 : Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir di Kota Palembang Tahun 2005-2014 (dalam rupiah)	45
Tabel 4.6 : Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Palembang.....	50
Tabel 4.7 : Hasil Uji Normalitas	52
Tabel 4.8. : Hasil Uji Heterokedastisitas.....	53
Tabel 4.9 : Hasil Uji Autokorelasi	54
Tabel 4.10 : Hasil Uji Multikolinearitas	55
Tabel 4.11 : Estimasi Potensi Penerimaan Pajak Parkir di Kota Palembang..	61
Tabel 4.12 : Frekuensi Parkir Rata-rata Menurut Jenis Kendaraan	63
Tabel 4.13 : Estimasi Potensi Penerimaan Pajak Parkir Mall di Kota Palembang periode satu bulan (dalam rupiah)	64
Tabel 4.14 : Tingkat Efektivitas Pajak Parkir di Kota Palembang Tahun 2005-2014 (dalam rupiah)	68

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. : Pertumbuhan Penerimaan Pajak Parkir di Kota Palembang Periode Tahun 2011-2014.....	6
Gambar 2.1. : Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah.....	10
Gambar 2.2. : Penyediaan dan Pembiayaan Barang Publik menurut Pigou ...	11
Gambar 2.3. : Kerangka Pemikiran.....	25
Gambar 4.1. : Peta Wilayah Administasi Kota Palembang	38
Gambar 4.2. : PDRB Atas Harga Konstan Kota Palembang 2004-2014 (dalam juta rupiah).....	47
Gambar 4.3 : Tren Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang Tahun 2014-2014.....	48
Gambar 4.4 : PDRB perkapita Kota Palembang.....	49
Gambar 4.5 : Pertumbuhan Jumlah Kendaraan di Kota Palembang.....	51

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 : Hasil Ouput Regresi Variabel Pajak Parkir.....	75
Lampiran 2 : Uji Normalitas.....	75
Lampiran 3 : Uji Autokorelasi.....	76
Lampiran 4 : Uji Heterokedastisitas.....	77
Lampiran 5 : Uji Multikolinearitas.....	77
Lampiran 6 : Upaya Perbaikan Multkolinearitas.....	78
Lampiran 7 : Uji model auxiliary.....	78
Lampiran 8 : Hasil Regresi Antar Variabel Independen.....	79
Lampiran 9 : Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Harga Konstan Tahun Dasar 2000 (dalam rupiah).....	80
Lampiran 10 : Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita Menurut Harga Konstan Tahun Dasar 2000 (dalam rupiah).....	80
Lampiran 11 : Data Target dan Realisasi Pajak Parkir di Kota Palembang Tahun 2005-2014 (dalam rupiah).....	81
Lampiran 12 : Data Jumlah Kendaran Bermotor di Kota Palembang Tahun 2005- 2014.....	81
Lampiran 13 : Hasil Data Observasi Lapangan.....	82
Lampiran 14 : Kuisisioner Penelitian.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah sebagai tolak ukur kemakmuran dan kesejahteraan secara adil dan merata. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut bukan suatu perkara yang mudah karena pemerintah memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam pelaksanaannya. Pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber yang dapat diandalkan. Sumber tersebut dapat diperoleh dari menggali potensi sumber daya daerah itu sendiri maupun berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan. Akan tetapi, pemerintah daerah harus berperan lebih dalam fungsinya dan dituntut agar dapat menggali potensi sumber daya dari daerahnya sendiri terutama pada sumber keuangan agar dapat membiayai pembangunan dan pemerintahan daerahnya dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat.

Pemerintah pusat telah memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri yang disebut sebagai otonomi daerah. Otonomi daerah selain memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan juga memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur keuangan daerahnya melalui desentralisasi fiskal. Pelaksanaan otonomi daerah saat ini diatur dalam Undang-undang No.12 Tahun 2008 dimana undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU sebelumnya yaitu UU No.22 Tahun 1999 (Darwin, 2010: 5). Desentralisasi fiskal di Indonesia baru

dilaksanakan sejak tanggal 1 januari 2001 berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 bahwa desentralisasi harus dilaksanakan paling lambat dua tahun sejak penetapannya (Widjaja, 2002: 41). Dengan adanya, desentralisasi yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berupa pembagian dana perimbangan antara pusat dan daerah diharapkan pemerintah daerah bisa mengalokasikan dana yang diperoleh dari pemerintah pusat secara efektif dan efisien.

Menurut UU No.25 Tahun 1999 jo UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah maka sumber keuangan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan (Syuroh, 2009: 104). Suatu daerah otonom dapat dikatakan mampu berotonom terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Hal ini dapat diartikan bahwa daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian terbesar sebagai sumber keuangan. Selain itu, ketergantungan terhadap pemerintah pusat harus dilakukan seminimal mungkin karena dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya masing-masing pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian secara fiskal.

Sejalan dengan adanya otonomi daerah, setiap pemerintah daerah di dorong untuk meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna untuk pembangunan daerah masing-masing serta membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Seperti dinyatakan dalam UU NO.18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah bahwa pajak dan retribusi daerah merupakan sumber

pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah itu sendiri. Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah harus melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerahnya. Salah satunya yaitu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara meningkatkan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Salah satu instrumen yang dapat diupayakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah melalui pemungutan pajak daerah. Pajak daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain-lain yang sah (Syuroh, 2009: 104). Penerimaan dari hasil pajak ini dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Menurut UU No.34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah (Syuroh, 2009: 105).

Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 pemerintah daerah diperkenankan untuk melakukan pemungutan pajak daerah. Pemungutan pajak daerah di suatu daerah disesuaikan dengan potensi dan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Pemerintah daerah Kota Palembang yang merupakan salah satu daerah otonom juga diberikan hak kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kota

Palembang dituntut untuk meningkatkan penerimaan daerahnya seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah.

Tabel 1.1 : Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Palembang Tahun 2010-2014 (dalam rupiah)

Tahun	Target APBD	Realisasi Penerimaan	%
2010	93,420,835,800	104,047,313,437	1.113748475
2011	172,117,431,035	207,746,349,410	1.207003545
2012	287,152,544,690	333,104,821,406	1.160027406
2013	322,113,406,602	357,230,028,259	1.109019435
2014	395,888,500,000	463,574,599,151	1.170972633

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa setiap tahunnya penerimaan pajak daerah di Kota Palembang terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 penerimaannya sebesar Rp 104,047,313,437. hingga tahun 2014 sebesar Rp 463,574,599,151. Maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak daerah di Kota Palembang selalu mencapai target penerimaannya walaupun setiap tahunnya target penerimaan pajak daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah terus ditingkatkan. Hal ini merupakan keberhasilan pemerintah daerah Kota Palembang dalam melakukan pemungutan pajak daerah.

Salah satu jenis pajak daerah yang juga memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak daerah adalah pajak parkir. Pajak Parkir merupakan jenis pajak daerah Kota Palembang yang diperkenankan untuk dilakukan pemungutannya oleh pemerintah Kota Palembang. Berdasarkan Pasal 1 Undang-

Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang diselenggarakan sebagai usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran (Siahaan, 2005: 407).

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kota Palembang maka pajak parkir akan menjadi potensi yang dapat menambah penerimaan daerah di Kota Palembang. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah kendaraan di Kota Palembang. Transportasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mempermudah aktivitas kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, semakin banyaknya penggunaan transportasi maka akan berdampak pada banyaknya penyediaan tempat parkir sehingga dapat mendorong penerimaan pajak parkir yang semakin meningkat.

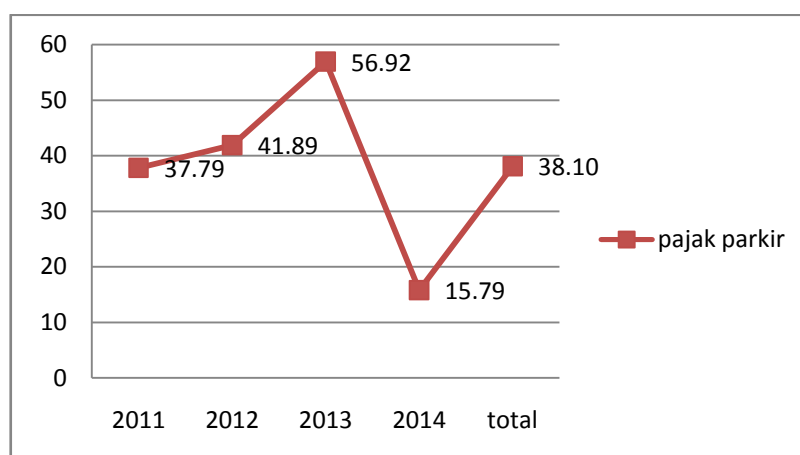
Tabel 1.2 : Penerimaan Pajak Parkir dan Hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang dari Tahun 2010-2014 (dalam rupiah)

Tahun	PAD	Pajak Parkir	Kontribusi(%)
2010	255,193,654,243	2,373,884,593	0.93
2011	372,978,041,916	3,816,026,337	0.01
2012	521,877,454,519	6,566,830,322	0.01
2013	689,103,604,093	15,243,492,916	0.02
2014	728,123,306,512	18,102,433,974	0.02

Total	2,567,276,061,283	46,102,668,142	0,99
--------------	--------------------------	-----------------------	-------------

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang (data diolah)

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak parkir dan hasil PAD Kota Palembang dari periode tahun 2010-2014, setiap tahunnya mengalami kenaikan. Kenaikan penerimaan PAD dan pajak parkir terbesar terjadi pada tahun 2014 yaitu PAD sebesar Rp. 689,103,604,093 dan pajak parkir sebesar Rp 18,102,433,974 serta total keseluruhan dari kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar 0,99%. Adapun pertumbuhan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pajak parkir di Kota Palembang, dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini.



Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang(data diolah)

Gambar 1.1. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Parkir di Kota Palembang dari Tahun 2011-2014

Berdasarkan Gambar 1.1 pertumbuhan penerimaan dari pajak parkir dari kurun waktu lima tahun yaitu periode tahun 2011-2014 setiap tahunnya cenderung

mengalami kenaikan. Pada saat tahun 2011 pajak parkir mengalami pertumbuhan sebesar 37,79%, tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 41,89% dan tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 56,92%, Akan tetapi, pada tahun 2014 pertumbuhannya mengalami penurunan yaitu sebesar 15,79%. Rata-rata pertumbuhan pajak parkir yaitu sebesar 38,10%. Maka dapat disimpulkan bahwa pajak parkir setiap tahunnya telah memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan daerah Kota Palembang.

Mengkaji hubungan pajak daerah dengan PDRB kita akan melihat hubungan yang fungsional, yaitu pajak merupakan fungsi dari PDRB. Peningkatan yang terjadi pada PDRB akan menambah penerimaan pemerintah untuk pembangunan program-program pembangunan, selanjutnya akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kembali. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat, maka akan mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan pungutan lainnya (Mangkoesobroto, 1998: 170). PDRB perkapita juga dapat digunakan sebagai indikator pengukur kemampuan atau daya beli masyarakat untuk membiayai pengeluarannya, salah satunya membayar pajak. Dengan kata lain, semakin tinggi PDRB per kapita riil suatu daerah maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penerimaan Pajak Parkir di Kota Palembang”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh PDRB perkapita dan jumlah kendaraan terhadap pajak parkir di Kota Palembang?
2. Berapa besar potensi penerimaan dari pajak parkir di Kota Palembang?
3. Bagaimana tingkat efektivitas dari pajak parkir di Kota Palembang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh PDRB perkapita dan jumlah kendaraan terhadap pajak parkir di Kota Palembang.
2. Untuk menganalisis besarnya potensi penerimaan pajak parkir di Kota Palembang.
3. Untuk menganalisis tingkat efektivitas pajak parkir di Kota Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain adalah:

1. Manfaat Akademis.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan sumber informasi tambahan untuk penelitian selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan analisis penerimaan pajak parkir di Kota Palembang.

2. Manfaat Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari pajak parkir.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggar, Krisna Arta. 2013 *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pad Sekabupaten/kota Di Provinsi Bali. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 5.3 :574-585 574, ISSN: 2302-8556.
- Asngari, Imam. 2013. *Modul Praktikum Ekonometrika Program Eviews dan SPSS*. Universitas Sriwijaya
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Dotulong, Garry A.G., David P.E. Saerang dan Agus T. Poputra. 2014. *Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Restoran Di Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 14 no. 2.
- Elisa Butarbutar, Tarida. 2014 *Analisa Peranan Pajak Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tomohon. Jurnal EMBA*, Vol.2 No.4, Hal. 697-704,ISSN 2303-1174.
- Gede, I Putu Pande Setya Pratama Dan I Wayan Suartana. 2014. *Perbandingan Tingkat Efisiensi Dan Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan Dinas Pendapatan Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 7.2, ISSN: 2302-8556 : 266-279
- Gusful, Ahmad. 2015. *Pad: Potensi Pajak Parkir di Kabupaten Wonosobo. Jurnal PPKM I* 47-60, ISSN: 2354-869X.
- Haryani, dkk. 2013 *Analisis Kontribusi, Elastisitas, Efisiensi dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bireuen. Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Volume 1, No. 1.
- Helti, Kristiana Advina. 2010. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Daerah Serta Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Dalam Pemungutan (Studi Kasus di Kabupaten Karanganyar)*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Kesek, Feisly. 2013 *Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. Jurnal EMBA* 1927 Vol.1 No.4 , Hal. 1922-1933, ISSN 2303-1174.
- Lidya, Christine, dkk. 2013. *Efektivitas Pajak Penerangan Jalan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal EMBA*, Vol.2 No.2, Hal. 1318-1326, ISSN 2303-1174.
- Mangkoesoebroto, guritno. 1998. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE

- Mangkoesoebroto, Guritno. 2009. *Ekonomi Publik Edisi 3*. Yogyakarta : BPFE.
- Marliyant,Dwi Sundi dan Sudarsana Arka. 2014. *Pengaruh Pdrb Terhadap Pajak Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Denpasar*. *E-Jurnal Ep Unud*, 3 [6] : 265-271 ISSN: 2303-0178
- Monginsidi, Riedel S.M. 2013. *Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Dinas Pengelola Keuangan, Aset, dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa*. *Jurnal EMBA*, Vol.1 No.4, Hal. 2069-2077, ISSN 2303-1174.
- Mosal, Maurin M. 2013. *Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) dan Penerapan Akuntansi di Kota Manado*. *Jurnal EMBA*, Vol.1 No.4, Hal. 374-382.
- Muthoharoh, Ika. 2009. *Peran Pajak Parkir Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang*. Skripsi, Program Studi Pendidikan Ekonomi Jurusan Ilmu Pengetahuan SosialFakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
- Nurhaidah. 2006. *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Bima*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang
- Pratama, I Putu Gede Pande Setya dan I Wayan Suartana. 2014. *Perbandingan Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan Dinas Pendapatan Kota Denpasar dan Kabupaten Badung*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, ISSN: 2302-8556 7.2 (2014): 266-279
- Puspowarsito. 2008. *Metode Penelitian Organisasi*. Bandung: Humaniora.
- Sukirno, Sadono. 2010. *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siahaan, P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Susanawat, Ferry, I Wayan Suparta, Muhammad Husaini. 2014. *Analisis Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Metro*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 3, NO 3.
- Suyanto, Murlan. 2010. *Pengaruh Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo*. Skripsi, Yayasan Kesejahteraan Pendidikan

dan Perumahan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara Surabaya

Suwarno, Agus Endro dan Suhartiningsih. 2008. *Efektivitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Volume 7, Nomor 2, hlm. 162-173.

Syuroh, Mat. 2009. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Felicha.

Tahwin, Muhammad. 2013. *Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah. Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, Vol. 18, 136 No. 2.

Taluke, Maxwel. 2013 *Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Halmahera Barat. Jurnal Emba*, Vol.1 No.3, Hal. 385-393, Issn 2303-1174.

Widjaja. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Widiyati, Siti Muhajiroh. 2010. *Potensi Pajak Restoran dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Boyolali*. Laporan Akhir, Program Diploma III Akuntansi Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.